



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2024 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, 01 Januari 2025


Plh. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP 197202251992031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Cascading Kinerja.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu – Isu Strategis	6
1.3.1 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	6
1.3.2 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.....	10
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah..	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	15
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.5 Perjanjian Kinerja	19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja.....	21
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	21
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terahir.....	24
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	25
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	26
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penuruna Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	27
3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	29
3.2 EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN.....	44
3.3 Inovasi	48
3.4 Penghargaan	48

Bab. IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan	8
Tabel 1.6	Laporan Hasil Evaluasi	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP	13
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	14
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	21
Tabel 3.2	Survei IKM Tahun 2023	23
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 – 2023	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	26
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	27
Tabel 3.6	Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2023	29
Tabel 3.7	Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja	29
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.9	Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2024 berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai realisasi investasi PMDN/PMA, jumlah investor PMDN/PMA Pada Tahun 2024 Realisasi 2727 atau sebesar 19.03%, dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.68% (Sangat Baik) atau sebesar 97.26%. Pada tahun 2024, Realisasi investasi di tahun 2024 sampai dengan bulan September mencapai Rp. 139,882,280,000,000,- atau sebesar 26.99%.

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2024 sebanyak 5 (lima) yaitu Predikat A dalam SAKIP Award 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Terbaik 3 pada IKPA Oleh Ditjen Bina Apresiasi Satker Dekonsentrasi, Stand Terbaik 3 Pada Indonesia Maju Exspo dan Forum 2024, Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kinerja pelayanan terpadu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2024, Mendapat piagam penghargaan Respon Pemenuhan Data Ilap Tercapat

Realisasi keuangan tahun 2024 adalah Rp. 17.417.557.620,- atau 90,63% dan realisasi fisik 100%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal, dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Cascading kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 menunjukkan penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja dari RPJMD ke Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Pada cascading kinerja tersebut dapat dilihat penjabaran misi Gubernur Sulawesi Tengah ke tujuan, sasaran, hingga ke tingkat sub kegiatan yang ada pada DPMPTSP Sulawesi Tengah. Dari cascading kinerja tersebut dapat dilihat keterkaitan capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam pencapaian misi Gubernur Sulawesi Tengah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

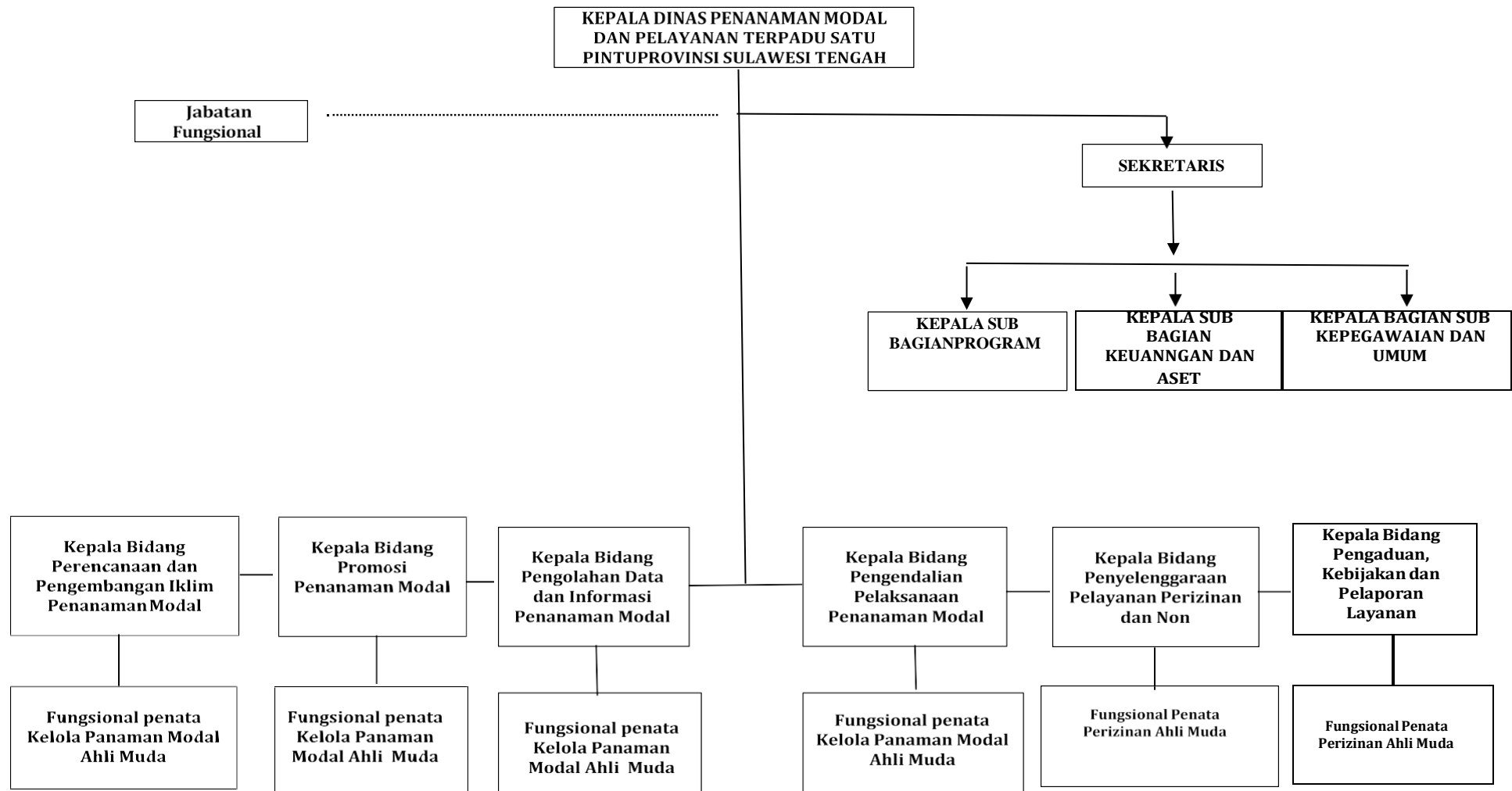
Selanjutnya besaran Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
 SESUAI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NO. 57 TAHUN 2022



1.3 Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
2. Potensi dan Peluang Investasi di Sulteng belum siap untuk ditawarkan;
3. Perda/Perkada, Kemudahan Investasi di sebagian kab/kota belum tersedia, melegalformalkan Regulasi RUPMK;
4. Belum terciptanya harmonisasi antara
5. Peraturan daerah dengan regulasi/ kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal.
6. Daerah Masih Menyusun regulasi akibat adanya perubahan regulasi pemerintah pusat;
7. Belum semua NSPK dari K/L yang berkaitan dengan adanya UU No. 11/2020 diterbitkan tentang Cipta Kerja

1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi berdasarkan eselonering sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	6 Orang
Eselon IV	3 Orang
Staf	86 Orang
Honorer /Tenaga Kontrak	66 Orang
Jumlah	162 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 162 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 6 orang, Eselon IV berjumlah 3 orang, staf berjumlah 86 orang, dan tenaga kontrak/honorer berjumlah 62 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	3 Orang
Golongan III	36 Orang
Golongan IV	18 Orang
Golongan IX	39 Orang
Non Golongan	66 Orang
Jumlah	162 Orang

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 39 Orang Golongan IX, 18 orang Golongan IV, 36 orang Golongan III, 3 orang Golongan II, dan 66 orang Non Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	5 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Pejabat Fungsional	15 Orang
Jumlah	29 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 15 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D III	D I	SLTA	SMP	SD	Jumlah
1	21	68	0	0	6	0	0	96

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP yang berpendidikan S3 berjumlah 1 Orang, S2 berjumlah 21 orang, S1 berjumlah 68 orang, DIII berjumlah 0 orang, dan SLTA berjumlah 6 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	10.182.469.463,00
3	Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	381.777.650,00
5	Aset tetap lainnya	73.298.850,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	93.881900,00
	Jumlah	36.746.906.979,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

a. Mobil Layanan Keliling (*Site Mobile Service*);

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selain melayani di dalam gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil layanan keliling (*Site Mobile Service*).

b. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik.

Saat ini DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah. **(Pergub No. 37 Tahun 2019 Tentang MPP)**. Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Provinsi ke-dua di Indonesia setelah DKI yang mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.6
Laporan Hasil Evaluasi

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Tahun 2024**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Dalam melaksanakan evaluasi internal harus ada notulensi, daftar hadir dan dokumentasi.	Dalam Melakukan Evaluasi kami selalu menyiapkan Notulensi, Daftar hadir dan Dokumentasi	Kepala Dinas	Selesai
2	Dokumen perencanaan kinerja dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai sampai jengang staf sehingga pegawai dapat memahami dan peduli serta berkimotmen untuk mencapai kinerja yang	Tertaksananya Pembuatan dokumen IKK dan PK	Kepala Dinas	Selesai
3	Dokumen laporan kinerja dapat dibuat per triwulan	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	Selesai
4	Laporan kinerja dapat menginformasikan efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dan capaian kinerja	Tertaksananya Pembuatan dokumen LKIJ	Kepala Dinas	Selesai
5	Sebaiknya target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sefaras dengan RPJMD/Renstra dan LKJIP	Menyesuaikan dengan data Arsitektur Kinerja terbaru	Kepala Dinas	Selesai
6	Melakukan reuiu internal berjengang terhadap laporan kinerja instansi pemerintahan	Melakukan reuiu terhadap Renja dan Renstra	Kepala Dinas	Selesai
7	Membuat dokumen atau bagan crosscutting kinerja internal yang bersinggungan antara sub bidang satu dengan lainnya serta bidang satu dengan bidang lainnya	Cascading sudah sesuai dengan Tabel Arsitektur terbaru	Kepala Dinas	Selesai
8	Membuat pedoman teknis atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal (AKI)	Pembuatan SOP Kinerja ASN DPMPTSP	Kepala Dinas	Selesai
9	Melakukan Evaluasi internal yaitu penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode tahuntertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun	Tertaksananya Pembuatan Dokumen LKIJ	Kepala Dinas	Selesai

Palu, 28 JUNI 2024
 MENGETAHUI,
 Pih. KEPALA DINAS PM-PTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



M. SATRI IENUSA, S.Sos., M.Si
 NIP. 19720225 199203 1 003

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2024 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi
2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	- Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.) - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000
2	Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif;
4. Menarik Investasi dengan menyiapkan data dan informasi serta melakukan promosi investasi yang inovatif;
5. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Bimtek dan Diklat Teknis PM dan Perizinan
2. Menyediakan Sarana Prasarana Prasarana Pendukung pada Mal Pelayanan Publik (MPP)
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT;
4. Menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
5. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi;
6. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
7. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik PMA, PMDN, melalui pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

VISI : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan Misi VIII : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1)	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	- Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan. - Menciptakan iklim investasi yang kondusif. - Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi. - Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya. - Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah. - Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website. - Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi. - Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas.
2)	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	- Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2024	DPA 2024	Bertambah/Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H			18.094.996.968	19.268.333.862	1,173,386,894
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	14,334,351,848	14,888,585,187	554,233,339
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	547,894,554	562,008,063	562,008,063
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	288,168,905	468,918,755	180,749,850
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	43,995,958	51,818,808	7,882,850
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,642,250	41,270,500	371,750
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,931,483,469	11,844,162,259	87,321,210
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,107,639,269	10,007,588,259	100,051,010
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,631,760,000	1,479,600,000	152,160,000
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	63,013,300	165,087,450	102,074,150
		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36,366,300	92,741,300	56,275,000
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Skpd	92,704,600	99,145,250	6,440,650
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79,554,300	166,824,400	87,270,100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79,554,300	166,824,400	87,270,100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,675,073	147,523,960	47,848,887
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55,369,198	57,242,160	1,872,962
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20,489,500	32,639,500	12.150,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23,816,375	57,642,300	33,825,925
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	330,316,954	445,992,706	115,675,752
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,284,700	24,275,452	8,990,752
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,672,578	59,268,578	9,569,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,359,676	362,448,676	97,089,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282,237,480	436,872,800	154,635,320
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,220,000	22,220,000	-
Pengadaan Mebel	113,190,010	226,926,000	113,735,990		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146,827,470	187,726,800	40,899,330		

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 (Lanjutan)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2023		Bertambah/Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,770,659	926,504,199	535,733,540
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496,436,816	413,542,552	82,894,264
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434,333,843	512,961,647	78,627,804
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,800,000	358,696,800	52,896,800
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190,900,000	192,930,000	2,030,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,450,000	69,850,000	12,400,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57,450,000	95,916,800	38,466,800
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	675100150	567533600	85.225.500
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	110639500	140737500	30,098,000
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	19,790,400	34,640,400	14,850,000
		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	90,849,100	106,097,100	15,248,000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	564460650	426796100	137,664,550
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	169,690,350	152,388,500	17,301,850
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	394,770,300	426,796,100	32,025,800
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	473.703.004	546.997.654	73.294.65
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	601522535	867061130	73.294.650
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	525,911,385	791,238,580	265,327,195
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75,611,150	75,822,550	211,400
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1,405,925,500	1,525,645,050	119,719,550
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1,405,925,500	1,525,645,050	119,719,550
		Pengawasan Penanaman Modal	511,470,900	719,963,750	208,492,850
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	285,268,650	234,825,350	50,443,300
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	609,185,950	570,855,950	383,330,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	267,973,220	337,973,070	69,999,850
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	267,973,220	337,973,070	69,999,850
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	267,973,220	337,973,070	69,999,850

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 (Lanjutan)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2024	DPA 2024	Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
		(Rp)	(Rp)	
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	810,123,715.00	929,147,325.00	119,023,610.00
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	400,999,425.00	470,999,125.00	69,999,700.00
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	207,989,725.00	255,655,725.00	47,666,000.00
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	193,009,700.00	215,343,400.00	22,333,700.00
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	409,124,290.00	458,148,200.00	49,023,910.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	30,425,650.00	30,425,650.00	-
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	378,698,640.00	427,722,550.00	49,023,910.00

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta daya tarik investasi. Sasaran kedua, Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2024 adalah Rp. 18,094,996,968,- dan bertambah sebesar Rp.1,173,386,894,- menjadi Rp. 19,268,333,862,- pada anggaran perubahan 2024.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran, juga dilaksanakan 1 (satu) program pendukung. Program pendukung ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2024 yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total

anggaran Rp. 14,334,351,848,- dan bertambah Rp. 554,233,339,- menjadi Rp. 14,888,585,187,- pada anggaran perubahan 2024.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp. 92.500.000.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.600 Proyek
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95% (Sangat Baik)

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja perubahan yang ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala DPMPTSP disajikan berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plh.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs.Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
Plh.KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 92.500.000.000.000
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.600 Proyek
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95% (Sangat Baik)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.888.585.187,00	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 719.922.100,00	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 867.061.130,00	APBD
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.525.645.050,00	APBD
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 337.973.070,00	APBD
6. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 929.147.325,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 19.268.333.862,00	

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMAN
Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

3.1 Capaian Kinerja

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertulng dalam Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Realisasi PMA serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp. 92,500,000,000,000,-	Rp. 139,882,280,000,000	66.13%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.600	2727	95.34%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	95% (Sangat Baik)	97,68%% (Sangat Baik)	97.26%

Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 dari indikator nilai realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, serta indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target investasi pada Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp. 92.500.000.000.000,-. Realisasi investasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 139,882,280,000,000,- dan target dengan capaian sebesar 66.13%, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMDN Rp. 4.592.770.000.000,-.
 - Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMA Rp. 135,289.300.000.000,-.
2. Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi juga dapat dicapai dengan sangat baik. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2024, dari target 2.600 proyek Januari – Desember Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaan sebanyak 2727 Laporan atau mengalami kenaikan sekitar 95.34%.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan DPMPTSP memberikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.68%. Hal ini berarti kinerja unit pelayanan DPMPTSP berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam kisaran nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 88,31 – 100,00. Nilai IKM DPMPTSP Prov. Sulteng tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah makin meningkat kualitasnya dilihat dari tingginya nilai unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap triwulannya. Disamping itu, nilai IKM yang semakin baik tersebut mencerminkan bahwa saat ini dengan adanya kemudahan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA (on line) maka minat masyarakat untuk berusaha semakin meningkat. Untuk lebih

jelasan, hasil survei IKM pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2
Survei IKM Tahun 2024

Keterangan :			No.	UNSUR	NRR
- 1 s/d 9		= Unsur-Unsur Pelayanan	1	Persyaratan	3,97
-		= Nilai Rata-Rata	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,93
- IKM		= Indeks Kepuasan	3	Waktu Penyelesaian	3,84
-		= Jumlah NRR IKM tertimbang	4	Biaya/Tarif	3,80
-		= Jumlah NRR Tertimbang x	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,87
- NRR Per		= Jumlah nilai per unsur dibagi	6	Kompetensi Pelaksana	3,74
		Jumlah Kuesioner yang	7	Perilaku Pelaksana	3,83
NRR		= NRR per unsur x	8	Penanganan Pengaduan, Saran dan	3,88
per unsur			9	Sarana dan Prasarana	4,00
IKM UNIT PELAYANAN : 98,80%					
Mutu Pelayanan :					
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)	88,31	100,00		
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)	76,61	88,30		
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)	65,00	76,60		
D (Tidak)	: (1,00 - 0,5996)	25,00	64,99		

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terahir

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4			-5			-6			-6		
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	18.550.510.000.000	42.669.623.790.000	230	33.750.000.000.000	111.182.495.630.000	329	35.750.000.000.000	111.980.000.000.000	313230%	37.750.000.000.000	139.882.280.000.000	26.99%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	68	425	625	403	2910	722	461	4943	11,88 %	519	2727	19.03%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,23% - 100%	98%		93%	98,00%	105%	94%	98,80%	105%	95%	97,68%	97,26%

Menurut tabel diatas Capaian Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) pada tahun 2021 mempunya target sebesar Rp.18.550.510.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.669.623.790.000,- dan capaian sebesar 230, sedangkan pada Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 68 dengan realisasi sebesar 425 dan Capaian sebesar 625 dan IKM sebesar 98%

Pada Tahun 2022 target Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) sebesar Rp. 33.750.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.182.495.630.000,- dan capaian sebesar 329, sedangkan pada Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 403 dengan realisasi sebesar 2910 dan Capaian sebesar 722, sedangkan target IKM sebesar 93% dengan realisasi sebesar 98,00% dan capaian sebesar 105%.

Pada Tahun 2023 Capaian Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) pada mempunya target sebesar Rp. 35.750.000.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 111.980.000.000.000,- dan Capaian sebesar 313,230 sedangkan pada target Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 461 dengan realisasi sebesar 4943 dan Capaian sebesar 11,88 pada IKM mempunyai target sebesar 94% dengan realisasi sebesar 98,80% dan capaian sebesar 105.

Pada Tahun 2024 Capaian Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) pada mempunya target sebesar Rp. 37.750.000.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 139,882,280,000,000,- dan Capaian sebesar 26.99% sedangkan pada target Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 519 dengan realisasi sebesar 2727 dan Capaian sebesar 19.03% pada IKM mempunyai target sebesar 95% dengan realisasi sebesar 97.68% dan capaian sebesar 97.26%. Data sampai dengan Desember 2024 menunggu Prees Release dari BKPM

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2024	Tingkat kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	139,882,280,000,000	37,750,000,000,000	26.99%
		Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2727	519	19.03%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97.68%	95%	97.26%

Dari table diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2024 sebesar Rp. 37.750.000.000.000,- Sedangkan Capaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 139.882.280.000.000,- tingkat kemajuan yaitu sebesar 26.99% Jumlah proyek investor bersekala nasional mempunyai Target akhir RENSTRA yaitu 519 proyek, pada tahun 2024 dengan capaian 2727 proyek Capaian sebesar 19.03%. Kualitas pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik yaitu 97.68% dari target akhir RENSTRA 2024 yaitu 95% dan tingkat kemajuan yaitu 97.26. Data sampai dengan Desember 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Pada tahun 2024 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar yaitu Rp. 131,62 Triliun. Target tersebut dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP dengan jumlah realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 139,882,280,000,000,- atau Capaian sebesar 106,28%.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional/Provinsi	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	139,882,280,000,000	131,620,000,000,000	106,28%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2727	519	19,03%
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,68%	97%	97,26%

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penuruna Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
2. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja.
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

6. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mengurangi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah-langkah dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama pada jajaran pemerintah daerah dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta merencanakan pengadaan sarana pendukung lainnya di tahun berikutnya.
6. Pemanfaatan secara maksimal Mal Pelayanan Publik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2024

Tabel 3.6
Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2024

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			pagu Anggaran		Tingkat Efisiensi (5-8)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64%	75	115%	14,888,585,187	13,302,854,976	13,302,854,867
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi	Program Pengembangan Iklim	92%	92	100%	719,922,100	709,111,405	709,111,300
	Program Promosi Penanaman Modal	76%	90,64	119%	867,061,130	848,984,525	848,984,425
	Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	100%	106,28	106%	1,525,654,050	1,397,018,993	1,397,018,904
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	92%	100	109%	337,973,070	329,568,366	329,568,260
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	95%	96,86	102%	929,147,325	892,864,895	892,84,793

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	14,888,585,187	75	13,302,854,976	115%	89,35%
Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Kebijakan Pemberian Kemudahan Fasilitas/Insentif Investor	%	92	719,922,100.00	92	709,111,405	100%	98,50%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Peningkatan Investor Berinvestasi Di Sulawesi Tengah Melalui Pameran Promosi Investasi Dalam Dan Luar Daerah Serta Media Promosi Penanaman Modal lainnya	%	76	867,061,130	90,64	848,984,525	119%	97,92%
Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Target Pemerintah Pusat	%	100	1,525,654,050	106,28	1,397,018,993	106%	91,57%

Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Data Penanaman Modal Dan Perizinan Non Perizinan Yang Dikelola Serta Dimutakhirkan Kedalam Sistem Informasi Penanaman Modal	%	92	337,973,070	100	329,568,366	109%	97,51%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Profesional Dan Akuntabel	Presentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	95	929,147,325	96,86	892864895	102%	98,10%

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indicator Program yaitu penunjang urusan daerah Provinsi dan indicator program yaitu Nilai SAKIP dan presentasi Realisasi Anggaran. Dengan kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah dan mempunyai indicator kinerja yaitu Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya laporan barang dan jasa, tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya dokumen keuangan, Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 14,888,585,187,- dengan realisasi sebesar Rp. 13,302,854,976,- atau 89,35%.

II. Program Pengembangan Iklim

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang

menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yang strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi. Indikator dari program ini yaitu persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan 92% dengan keluaran berupa 1 (satu) laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 719.922.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 709.111.405,- atau 98.50%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 92%, realisasi yaitu 92% dan capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan dengan keluaran berupa 1 (satu) laporan/dokumen Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 140.737.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.271.710,- atau 95.41%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mempunyai indikator kinerja yaitu Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan RAPERGUB Sulawesi Tengah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 34.640.400,- dengan realisasi Rp. 34.640.400,- atau 100%.

b. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Target indikator sub kegiatan ini dapat direalisasikan 93.91%, dimana dalam sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 106.097.100,- dengan realisasi Rp. 99.631.310,- atau 93.91%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen pengembangan peta potensi

investasi daerah berbasis spasial. Target kegiatan ini dapat dicapai 2 Dokumen, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dihasilkan 1 (satu) dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 579.184.600,- dengan realisasi Rp. 574.83.9695,- atau 99.84%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mempunyai indikator yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan Perencanaan Kawasan Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai dengan keliiaran 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 152.388.500,- dengan realisasi Rp.150.170.085,- atau 98.52%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usah Provinsi

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi.

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Evaluasi Kemitraan Usaha antara UMKM dan Investor kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat mencapai 1 Dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 426.796.100,- dengan realisasi Rp. 424.669.610,- atau 99.50%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal adalah program yang mengkaji dan menghasilkan pemahaman yang sinergi serta peningkatan kualitas dalam melakukan promosi penanaman modal. Program ini mempunyai sasaran strategis yaitu Meningkatkan Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator yaitu persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya.

Pada bulan Januari – Desember 2024 tercatat jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan sebanyak 34.610. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2024 Rp. 867.061.130,- dengan realisasi sebesar Rp. 848.984.525,- atau 97.92%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 76%, realisasi yaitu 90,64% dan capaian kinerja kegiatan ini 119%.

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki Indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Target indikator kegiatan yaitu 2 (Dua) laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, T.A. 2024 sebesar Rp. 470.999.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.1604.25,- atau 98.12%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;

dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2024 sebesar Rp. 791.238.580,- dengan realisasi sebesar Rp 778.037.387,- atau 98.33%.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah mengikuti dan melaksanakan pameran dalam dan luar daerah yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pameran. Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi.

Event pameran dalam daerah yang dibuat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang DPMPTSP kabupaten/kota dan mengikutsertakan seluruh ODP di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yaitu sulteng ekspo d mana DPMPTS menjadi tuan rumah dari kegiatan tersebut. Target indikator sub kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 75.822.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.947.138,- atau 93.57%.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dan perizinan penanaman modal. Sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan

Akuntabel. Indikator program ini adalah Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Program ini mempunyai target indikator persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95%. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan DPMPTSP pada tahun 2024 memberikan hasil IKM 97.68% yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai Interval Konversinya berkisar antara 88,30 – 100,00 yang berarti mutu pelayanan nilai “A” dan kerjanunit pelayanan (DPMPTSP) dipersepsikan “Sangat Baik” oleh masyarakat penggunanya, sehingga capaian indikator program ini adalah 103%. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 929.147.325,- dengan realisasi sebesar Rp. 892.864.895,- atau 96.10 %. Target indikator kinerja yaitu sebesar 95%, realisasi yaitu 96,86% dan capaian kinerja kegiatan ini 102%.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Target indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (Dua) dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 470.999.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.160.425,- atau 98.12%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

a. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha.

Sub kegiatan ini memiliki target 2200 kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota. Capaian indikator sub kegiatan ini adalah 2517 %. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 255.655.725,- dengan realisasi sebesar Rp. 253.727.725,- atau 99.25%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Target indikator sub kegiatan yaitu 300 orang atau perusahaan yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Target indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan capaian 85%. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A. 2024 sebesar Rp. 215.343.400,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 208.432.700,- atau 96.79%.

2. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Target indikator kegiatan ini adalah 2 (Dua) dokumen laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 458.148.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 430.704.470,- atau 94.01%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis IT, diantaranya dengan melaksanakan workshop OSS bagi pelaku usaha UMK dan Non UMK. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 2200 pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Target ini dapat terealisasi dengan jumlah pelaku usaha yang mendapat layanan, sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 90%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2024 sebesar Rp. 427.722.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 404.712.770,- atau 94.62%.

b. Sub Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target ini dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini yaitu 85%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 30.425.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.991.700,- atau 85.43%.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator program yaitu Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat.

Target indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100% mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi (BKPM) menetapkan target realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 131.62 Triliun. target ini dapat dicapai dengan realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sampai dengan bulan September adalah sebesar Rp. 98.6 Triliun. Sehingga capaian indikator program sampai adalah 79%. Pagu anggaran program pada T.A. 2024 sebesar Rp. 1.525.645.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.397.018.993,- atau 100%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 100, realisasi yaitu 106,28% dan capaian kinerja kegiatan ini 106%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal.

Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu 3 (tiga) laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal. Jumlah realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 sampai dengan bulan Desember adalah Rp. 139,882,280,000,000 dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang terserap sebanyak 50.773 orang. Capaian indikator kegiatan adalah 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar sebesar Rp. 1.525.645.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.397.018.993,- atau 91.57%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Modal memiliki indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 17 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2024 sebesar Rp. 719.963.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 629.327.693,- atau 87.41%.

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

Target indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 378 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 79%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 570.855.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 557.875.950,- atau 97.73%.

c. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan.

Target indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 12 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 234.825.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.815.350,- atau 89.35%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah program yang menyediakan data laporan penanaman modal dan data perizinan non perizinan beserta informasi penanaman modal. Sasarannya adalah Meningkatkan Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini memiliki indikator yaitu persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal.

Indikator program ini menargetkan sebanyak 92%, realisasi yaitu 100% dan capaian kinerja kegiatan ini 109%. data penanaman modal dan perizinan-non perizinan dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal. Data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola dan dimutakhirkan ke dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebanyak 94%, sehingga capaian indikator program ini adalah 102%. Pagu anggaran program pada T.A. 2024 sebesar Rp. 337.973.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.568.366,- atau 97.51%.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Potensi Investasi Regional (PIR) untuk mendukung capaian indikator kegiatan. Sebagai hasilnya disusun 1 (satu) laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2024 sebesar Rp. 337.973.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.568.366,- atau 97.51%.

Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (*updating*) data investasi. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 1 (satu) dokumen yang berisi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2024. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini adalah 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2024 sebesar Rp. 337.973.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.568.366,- atau 97.51%.

3.2 EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 program. Sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sementara sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				pagu Anggaran		Capaian Kinerja X Pagu Anggaran (5X6)	7 - 8
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Program Pengembangan Iklim	Presentase Kebijakan Pemberian Kemudahan fasilitas/Insentif investor	92%	92%	100%	719.922.100	709.111.405	7.199.221.000	10.810.695
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investor Berinvestasi di Sulawesi tengah Melalui Pameran Promosi Investasi Dalam dan Luar Daerah Serta Media Promosi Penanaman Modal lainnya	76%	90,64%	119%	86.7061.130	848.984.525	3.216.796.792	18.076.605
	Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	Presentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Target Pemerintah Pusat	100%	106,28%	106%	1.525.645.050	1.397.018.993	114.225.044.894	128.626.057
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Data Penanaman Modal dan Perizinan Non Perizinan yang Dikelola Serta Dimutakhirkan ke Dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	92%	100%	109%	337.973.070	32.9568.366	337.973.070	8.404.704
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Penuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	96,86%	102%	929.147.325	892.864.895	966.313.218	36.282.430

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.8, maka diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.268.333.862,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.

10.249.388.259,06,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.582.072.803,00,- dan Belanja Modal Rp. 436.872.800,00,- Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp. 8.788.554.620,00,- atau 85,75% Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8.259.270.540,00 atau 96,24%,- dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 432.578.000,00,- atau 99,02%. Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 17.024.144.854,-. Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024

Nomor	URAIAN	Total Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	S I L F A
			Rp	%	%	Rp
2:18:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,888,585,187	13,302,854,976	89,35%	93%	1585730211
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562,008,063	527,514,276	93,86	95%	34,493,787
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	468,918,755	446,080,196	95,13%	97%	22,838,559
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51,818,808	46,248,030	95,13%	98,3%	5,570,778
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,270,500	35,186,050	95%	97,6%	6,084,450
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,844,162,259	10,357,539,023	87,45%	93,5%	1,486,623,236
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,007,588,259	8,546,754,620	85,40%	94,6%	1,460,833,639
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,479,600,000	1,466,400,000	99,1%	100%	13,200,000
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	165,087,450	158,205,642	95,83%	98,7%	6,881,808
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	92,741,300	89,621,223	96,64%	99,9%	3,120,077
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	99,145,250	96,557,538	97,39%	100%	2,587,712
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166,824,400	161,302,450	96,69%	100%	5,521,950
2.18.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	166,824,400	161,302,450	96,69%	1	5,521,950
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147,523,960	138,188,815	93,67%	98,3%	9,335,145
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57,242,160	56,840,000	99,30%	1	402,160
2.18.01.1.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32,639,500	32,239,500	98,77%	1	400,000
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	57,642,300	49,109,315	85,20%	94,3%	8,532,985
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445,992,706	428,418,095	96,06	100%	17,574,611
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,275,452	23,995,000	98,84	100%	280,452
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,268,578	55,472,600	93,60	100%	3,795,978
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	362,448,676	348,950,495	96,28	100%	13,498,181
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436,872,800	432,578,000	99,02	100%	4,294,800
2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,220,000	19,700,000	88,66	94,4%	2,520,000
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	226,926,000	225,509,000	99,38	100%	1,417,000

2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	187,726,800	187,369,000	99.81	100%	357,800
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926,504,199	901,960,931	97.35	99.8%	24,543,268
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	413,542,552	406,277,938	98.24	99.8%	7,264,614
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512,961,647	495,682,993	96.63	99.8%	17,278,654
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,696,800	355,353,386	99.07	100%	3,343,414
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	192,930,000	190,080,231	98.52	99.8%	2,849,769
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	69,850,000	69,645,000	99.71	100%	205,000
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	95,916,800	95,628,155	99.70	100%	288,645

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 (Lanjutan)

Nomor	URAIAN	Total Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	S I L F A
			Rp	%	%	Rp
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	719,922,100	709,111,405	98.50	100%	11.667.980
02.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	140,737,500	134,271,710	95.41	100%	385
02.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	34,640,400	34,640,400	100.00	100%	0
02.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	106,097,100	99,631,310	93.91	100%	385
02.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	579,184,600	574,839,695	99.25	100%	11.282.980
02.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	152,388,500	150,170,085	98.54	100%	855.686
02.18.02.1.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	426,796,100	424,669,610	99.50	100%	10.427.294
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	867,061,130	848,984,525	97.92	100%	24,493,167
02.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	867,061,130	848,984,525	97.92	100%	24,493,167
02.18.03.1.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	791,238,580	778,037,387	98.33	100%	1,514,000
02.18.03.1.01.02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75,822,550	70,947,138	93.57	100%	22,979,167
02.18.04.1.01	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	929147325	892.864.895	93%	100%	36.282.430
02.18.04.1.01.02	Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	470.999.125	148.556.250	89%	100%	18,165,995
02.18.04.1.01.03	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255.655.725	156.524.780	98%	100%	8.838.700
	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	215.343.400	208432700	90%	98%	51.228.666
02.18.04.1.02	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	458148200	430704470	93%	100%	127.300.370
02.18.04.1.02.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	30.425.650	25.991.700	93%	100%	4.433.950
02.18.04.1.02.04	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	427.722.550	40.4712.770	95%	100%	23.009.780
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,525,645,050	1,397,018,993	91.57	100%	128,626,057

2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1,525,645,050	1,397,018,993	91.57	98,7%	128,626,057
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	719,963,750	629,327,693	87.41	94,4%	90,636,057
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	234,825,350	209,815,350	89.35	98%	25,010,000
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	570,855,950	557,875,950	97.73	100%	12,980,000
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	337,973,070	329,568,366	97.51	100%	8,404,704
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	337,973,070	329,568,366	97.51	100%	8,404,704
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	337,973,070	329,568,366	97.51	100%	8,404,704

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.787.930.702.00,- atau dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 1.460.833.639,00,-
2. Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 322.802.263,00,-
3. Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 4.294.800,00,-

3.3 INOVASI

Pada tahun 2024 DPMPTSP membuat banua Investasi

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP yang diperoleh pada tahun 2004 sebagai berikut :

1. Predikat A dalam SAKIP Aword 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Terbaik 3 pada IKPA Oleh Ditjen Bina Apresiasi Satker Dekonsentrasi
3. Stand Terbaik 3 Pada Indonesia Maju Exspo dan Forum 2024
4. Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kinerja pelayanan terpadu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2024
5. Mendapat piagam penghargaan Respon Pemenuhan Data Ilap Tercapat

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan baik, dengan capaian melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Realisasi investasi di tahun 2024 mencapai Rp. 139,882,280,000,000,- atau 26.99% Jumlah investor berskala nasional tahun 2024 adalah 2727 proyek atau sebesar 19.03%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 dicapai 97.68% dengan predikat Sangat Baik.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 adalah 90,63%
5. Realisasi keuangan tahun 2024 adalah Rp. 17.417.557.620,- atau 90,63% dan realisasi fisik 100%.
6. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2024 sebanyak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP Aword 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Terbaik 3 pada IKPA Oleh Ditjen Bina Apresiasi Satker Dekonsentrasi, Stand Terbaik 3 Pada Indonesia Maju Exspo dan Forum 2024, Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kinerja pelayanan terpadu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2024, Mendapat piagam penghargaan Respon Pemenuhan Data Ilap Tercapat

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan rencana kinerja di tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2024 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, 01 Januari 2025

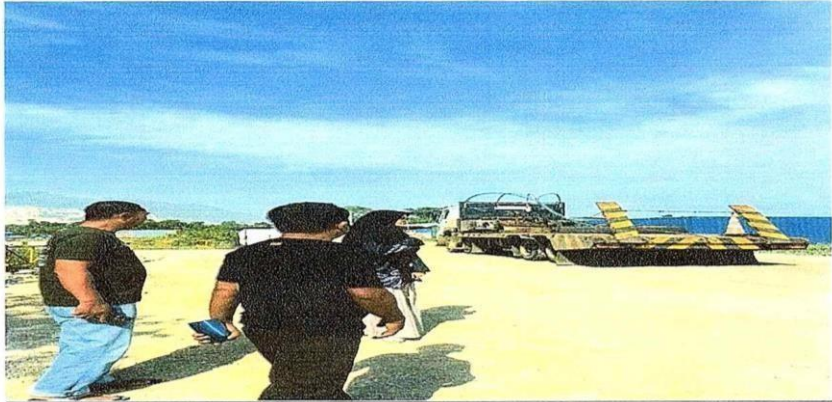

PILIH KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP 197202251992031003

Dokumentasi Rapat Tim Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024



Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Investasinya Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Dokumentasi Inspeksi Lapangan



PT. Kinarya alam Semesta



PT. Delta Subur Permai (Pertanian)



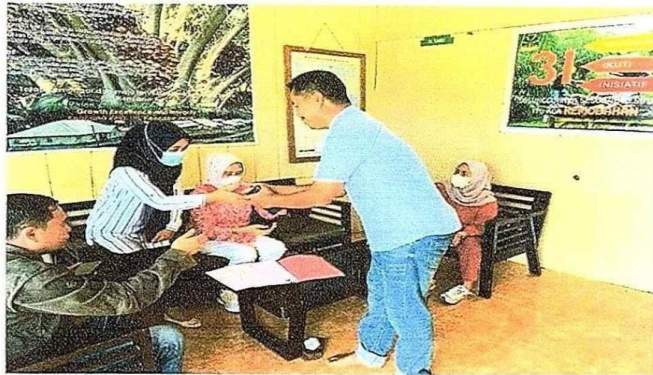
PT. Indopower Cahaya Nusantara



PT. Morowali Agro Mandiri (lahan Sawit)



PT. Tujuh Sumber Energi Abadi



PT. Paradigma Baru Pelayaran



PT. Delta subur Permai (perindustrian)



Bimbingan Teknis/Pelatihan Implementasi Perizinan maupun Pengawasan Perizinan berusaha, Bimtek Yang Dil;akukan Berdampak Pada Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal Yang Masuk Pada tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plh.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs.Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

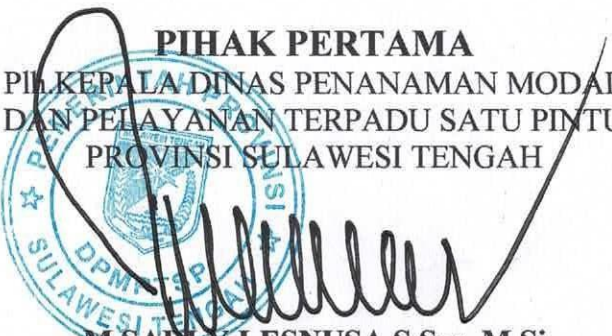
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
PLH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH


M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 92.500.000.000.000
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.600 Proyek
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95% (Sangat Baik)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.888.585.187,00	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 719.922.100,00	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 867.061.130,00	APBD
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.525.645.050,00	APBD
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 337.973.070,00	APBD
6. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 929.147.325,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 19.268.333.862,00	

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
Hh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plh.Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Palu, 18 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Indeks RB Perangkat Daerah	66 Indeks
	- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Indeks
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentasi Realisasi Anggaran	96%
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Pengelola Barang Milik Daerah	1 Lap
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	- Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Lap
	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Lap
	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap

PROGRAM & KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.888.585.187	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 562.008.063	
	TOTAL	Rp. 562.008.063	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.844.162.259	
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 166.824.400	
	TOTAL	Rp. 12.010.986.659	
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 147.523.960	
2	Kegiatan Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 445.992.706	
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 436.872.800	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 926.504.199	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 358.696.800	
	TOTAL	Rp. 2.315.590.465	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 14.888.585.187	

Palu, 18 NOVEMBER 2024
 Sekretaris

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah



M.SADLY LEANUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk. I
 Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDHALIA,SE.,MM
Jabatan : Plh.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA,S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plh.Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



M.SADLY LESNUSA,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, 18 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

Plh.KEPALA BIDANG PERENCANAAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

AFDHALIA,SE.,MM
Pembina IV/a
Nip. 19740928 200212 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA


SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sebaran Investasi - Tersusunya Peta Potensi - Tersedianya Dokumen RUPM Daerah Provinsi - Tersedianya Regulasi yang mendukung Investasi	Jumlah Kawasan Investasi Baru - Jumlah Dokumen Peta Potensi - Jumlah Dokumen RUPM Daerah Provinsi - Jumlah Regulasi yang disusun	92% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 719.922.100	APBD
1 Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp. 140.737.500	
2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp. 579.184.600	
TOTAL ANGGARAN	719.922.100	

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, **18 NOVEMBER** 2024
 Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim PM

AFDHALIA, SE., MM
 Pembina IV/a
 Nip. 19740928 200212 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plh. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Palu, 10 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG
PROMOSI PENANAMAN MODAL



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690320 200003 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses Informasi Potensi Investasi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Potensi Investasi Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Penanaman Modal	76%
	- Meningkatkan Strategi Promosi Penanaman Modal	- Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen
	- Meningkatkan Penyebaran Informasi Promosi Penanaman Modal	- Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyebaran Informasi	1 Dokumen

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN KET

1 Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	867.061.130	APBD
1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp.	867.061.130	
TOTAL ANGGARAN		867.061.130	

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah



M.SADLY LASNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, **10 NOVEMBER** 2024
 Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal



Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19690320 200003 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSIANA, SH.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA,S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plh.Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

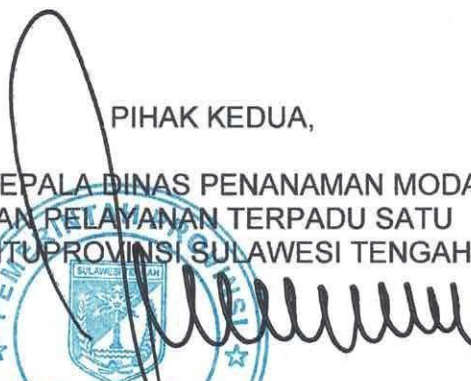
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Pih.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH Pih. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL


M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003


OSIANA, SH., M.Si
Pembina
Nip. 19721027 200212 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No. (1)	Sasaran Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
1	Tersedianya Data & Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan - Terkelolanya Data PMA dan PMDN - Terkelolanya data dan Informasi Perizinan dan Non-perizinan - Tersedianya Analisa Data PMA dan PMDN, Perizinan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Data PMA dan PMDN yang dikelola - Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non-perizinan - Jumlah Dokumen Analisis Data PMA dan PMDN, Perizinan Non Perizinan	92% 23 Sektor Usaha 3 Laporan -

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

337.973.070

APBD

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi


Rp. 337.973.070

TOTAL ANGGARAN

337.973.070

Pth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, ~~10~~ **NOVEMBER** 2024
 Kepala Bidang
 Pengolahan Data dan Informasi
 Penanaman Modal

OSIANA, S.H., M.Si
 Pembina
 Nip. 19721027 200212 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MINARNI NONGTJI, S.Pd.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA
Jabatan : Plh.Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, 10 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Dr. MINARNI NONGTJI, S.Pd., M.Si
Pembina Tkt.I
Nip. 19680814 199503 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMDN Ketentuan Penanaman Modal	100%
	- Meningkatkan Pengawasan Terhadap Proyek PMDN	- Persentase Proyek PMDN yang dilakukan Pengawasan	100%
	- Meningkatkan Pemantauan Terhadap Proyek PMDN	- Persentase Proyek PMDN yang dilakukan Pemantauan	100%
	- Meningkatkan Pembinaan Pelaku Usaha PMDN	- Persentase Pelaku Usaha PMDN yang Diberikan Pembinaan	100%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp. **1.525.645.050** **APBD**

1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rp. 1.525.645.050

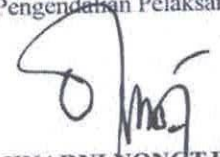
TOTAL ANGGARAN

Rp. **1.525.645.050**


 Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

M. SADLY LASNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, 10 NOVEMBER 2024
 Kepala Bidang
 Pengendalian Pelaksanaan PM


Dr. MINARNI NONGTJILS, Pd., M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19680814 199503 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plh.Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

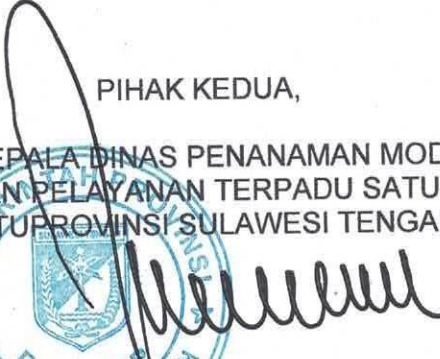
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palu, 18 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN


M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003


ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Pembina
Nip. 19741028 200112 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No. (1)		Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Ketentuan Peraturan	Persentase Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang Terbit Sesuai Ketentuan	80%
	- Terlaksananya Workshop Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Pelaku Usaha	- Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Workshop	40
	- Terfasilitasinya Pelaku pelaku Usaha dalam Mengurus Legalitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	- Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi	250
	- Meningkatnya SDM penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan	- Jumlah SDM yang memahami penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan	23
	- Tercapainya Kesepahaman Aparatur Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan	- Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	2
	- Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	- Persentase Permohonan Izin dan Nonperizinan yang Diterbitkan	80%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pelayanan Penanaman Modal

1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

ANGGARAN	KET
Rp. 458.148.200	APBD
Rp. 458.148.200	

TOTAL ANGGARAN

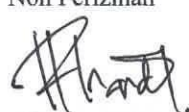
Rp. 458.148.200

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, 18 NOVEMBER 2024
 Kepala Bidang
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &
 Non Perizinan



ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
 Penata Tingkat I
 Nip. 19741028 200112 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKKA, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plh. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

Palu, 18 ~~NOVEMBER~~ 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN

SISKKA, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19671107 198903 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No. (1)	Sasaran Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan - Terlaksananya layanan Konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan - Tersedianya kebijakan regulasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan - Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Persentase Regulasi yang Telah diharmonisasikan, disinkronisasikan, dan disimplifikasi - Persentase pemohon konsultasi yang terlayani - Persentase hasil harmonisasi, simplifikasi dan sinkronisasi regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan - Jumlah laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	100% 100% 100% 95%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pelayanan Penanaman Modal

1 Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN **KET**
 Rp. **470.999.125** **APBD**
 Rp. 470.999.125

Rp. **470.999.125**
 Palu, **18 NOVEMBER** 2024
 Kepala Bidang
 Pengaduan, Kebijakan dan
 Pelaporan Layanan

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003

SISKA, S.Sos, M.Si
 Pembina Tkt I
 Nip. 19671107 198903 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK ERNAWATI, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 18 November 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

TITIK ERNAWATI, SE., MM
Pembina
Nip. 19690511 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 70.00 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 18 Laporan
2	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

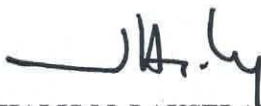
KETERANGAN

1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	10.007.588.259	APBD
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.479.600.000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	165.087.450	
4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	92.741.300	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	99.145.250	
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	166.824.400	
	TOTAL ANGGARAN	Rp.	12.010.986.659	

Palu, 10 November 2024

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

Kepala Sub Bagian
 Keuangan dan Asset



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004



TITIK ERNAWATI, SE.,MM

Pembina

Nip. 19690511 199003 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE., M.P.W.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 10 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM

IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE. M.P.W.P
Penata Tingkat I
Nip. 19820919 200701 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRET
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PROGRAM
 TAHUN ANGGARAN : 2024

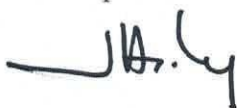
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<p>9 Dokumen</p> <p>3 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>

SUB KEGIATAN

		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 468.918.755	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 51.818.808	
3	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 41.270.500	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 562.008.063	

Palu, 18 NOVEMBER 2024

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk. I
 Nip. 19720902 200003 1 004

Kepala Sub Bagian
 Program



IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE., M.P.W.P
 Penata Tingkat I
 Nip. 19820919 200701 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANTI MAKARAU,ST.,MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 10 NOVEMBER 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

FEBRIANTI MAKARAU,ST.,MM
Penata Tkt. I
Nip. 19810224 200801 2 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

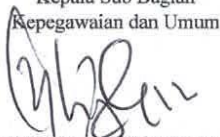
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
	- Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang
2	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3	- Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	1.00 Unit
	- Tersedianya Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit
4	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
5	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit

SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 57.242.160	APBD
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 32.639.500	
3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Rp. 57.642.300	
	TOTAL	147.523.960	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp. 24.275.452	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 59.268.578	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 362.448.676	
	TOTAL	445.992.706	
7	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 22.220.000	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 226.926.000	
9	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 187.726.800	
	TOTAL	436.872.800	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 413.542.552	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 512.961.647	
	TOTAL	926.504.199	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 192.930.000	
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 69.850.000	
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 95.916.800	
	TOTAL	358.696.800	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.315.590.465	

Palu, 18 NOVEMBER 2024

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



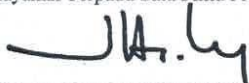
FEBRIANTI MAKARAU, ST.,MM

Penata Tk. I

Nip. 19810224 200801 2 014

Sekretaris

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng



NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004